BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Pertama, (Danisa Luthfi Azura, 2023), ditemukan bahwa fungsi-fungsi tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif di Indonesia, namun terdapat upaya untuk mencapai integrasi dan transparansi yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus, didukung oleh penyebaran kuisioner, dan berlandaskan pada teori fungsi partai dari Gabriel Almond. Hasil studi menunjukkan bahwa keunikan pelaksanaan komunikasi politik di DPD Partai Gerindra Sumatera Barat dipengaruhi oleh sosok Prabowo Subianto, yang sangat dikagumi oleh masyarakat setempat; pesan dari Ketua Umum partai sering diimplementasikan tanpa melalui mekanisme formal yang biasa. Selain itu, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan kekerabatan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, di mana DPD Partai Gerindra memanfaatkan acara-acara adat untuk memperkuat komunikasi politik dan mengumpulkan aspirasi masyarakat. Masyarakat dapat menyalurkan harapan dan kepentingan mereka melalui kegiatan ini, sehingga kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan kearifan lokal, menciptakan keberlangsungan politik yang harmonis di antara warga Sumatera Barat. Penelitian ini akhirnya menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi partai telah sejalan dengan teori yang ada dan menunjukkan perbaikan berkelanjutan pasca Pemilihan Umum.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Alma Nuraflah & Iman Madani Siregar, 2021) menyoroti peran penting komunikasi politik dalam meningkatkan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi E di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sebelumnya merasa tidak puas dengan kinerja anggota DPRD pada periode sebelumnya, namun kondisi tersebut berubah dengan adanya peningkatan yang signifikan pada kinerja anggota DPRD Komisi E periode sekarang. Melalui analisis data dengan model Miles dan Huberman, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi politik yang diterapkan oleh anggota DPRD Komisi E memberikan dampak yang positif, di mana hal tersebut berkontribusi pada perbaikan pelayanan publik dan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut, khususnya di Sumatera Utara.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Andi Kardian Riva'i, 2020) dengan judul *Komunikasi Politik dalam Fungsi Budgeting DPRD Kabupaten Indragiri Hulu* bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam proses komunikasi politik yang berlangsung dalam konteks pelaksanaan fungsi budgeting oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi dinamika tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penetapan anggaran, DPRD memiliki peran yang sangat penting melalui Badan Anggaran (Banggar), yang berkolaborasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kerja sama ini menghasilkan dokumen-dokumen penting, seperti Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Semua keputusan anggaran tersebut disusun dan disepakati dengan merujuk pada buku pedoman anggaran daerah, yang menjadi dasar dalam perumusan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi politik memiliki peran strategis dalam fungsi penganggaran, di mana komunikasi tidak hanya sekadar penyampaian informasi, melainkan juga mencakup strategi, media, serta bentuk komunikasi yang khas yang mencerminkan dinamika kepentingan politik. Konstruksi politik yang terbentuk dalam proses ini bersumber dari pemahaman bersama, kesadaran kolektif, dan wacana publik yang berkembang, serta menggambarkan hubungan timbal balik antara belanja daerah dan penerimaan daerah. Dengan demikian, fungsi budgeting tidak hanya bekerja berdasarkan

kepentingan politik semata, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip kebijakan fiskal, fungsi alokasi sumber daya secara adil, serta asas pemerataan pembangunan yang menjadi tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah.

Keempat, menurut (Ismunasari, 2022) penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan reses anggota legislatif, khususnya di Komisi I DPRD Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam menangani permasalahan publik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan melibatkan delapan informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pelaksanaan reses tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas reses di DPRD Kota Kendari masih perlu diperbaiki. Beberapa masalah yang ditemukan antara lain adalah kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan reses, tidak adanya penyampaian materi yang jelas selama kegiatan, serta rendahnya partisipasi masyarakat yang hadir dan terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara anggota legislatif dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas usulan dan partisipasi publik. Penelitian ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam metode pelaksanaan reses agar dapat lebih efektif sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penelitian kelima berjudul "Model Komunikasi Reses Anggota DPRD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Bangkalan" yang dilakukan oleh Holilah pada tahun 2023, bertujuan untuk menganalisis model komunikasi reses yang diterapkan oleh anggota DPRD di Kabupaten Bangkalan, khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana latar belakang pendidikan anggota dewan dapat mempengaruhi model komunikasi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, dan melibatkan 10 informan yang terdiri dari anggota DPRD

dengan latar belakang pendidikan sarjana dan non-sarjana, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, dan perwakilan partai. Berdasarkan temuan penelitian, tidak ditemukan perbedaan signifikan antara anggota DPRD berpendidikan sarjana dan non-sarjana dalam hal model komunikasi yang mereka terapkan. Namun, kendala-kendala dalam proses komunikasi tetap ada, termasuk perbedaan dalam jumlah partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam forum reses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat harapan akan perbedaan model komunikasi berdasarkan pendidikan, tidak ditemukan perbedaan signifikan antara anggota berpendidikan sarjana dan non-sarjana dalam praktik reses. Model komunikasi cenderung bersifat dua arah, namun kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam menyampaikan aspirasi, di mana mayoritas suara yang terdengar berasal dari laki-laki. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam representasi gender selama proses reses dan menekankan perlunya upaya untuk menciptakan suasana yang lebih inklusif, di mana semua kelompok masyarakat merasa terdorong untuk berpartisipasi penuh dalam dialog politik dan pengambilan keputusan (Holilah, 2023).

Keenam, GKR Ayu Koes Indriyah melaksanakan berbagai bentuk komunikasi langsung dengan konstituen melalui kegiatan reses, ceramah, dan diskusi, serta aktif di media cetak dan elektronik untuk menyampaikan pesan-pesan penting terkait nilai-nilai agama, Pancasila, pendidikan budi pekerti, dan pentingnya menjaga tradisi adat budaya. Meski demikian, penelitian ini juga mencatat beberapa faktor penghambat dalam proses komunikasi politiknya, terutama keterbatasan tugas dan wewenang DPD RI yang berbeda dengan lembaga legislatif lainnya, seperti DPR RI, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran DPD yang relatif baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, faktor pendukung seperti pemanfaatan media yang sudah ada, fasilitas yang memadai untuk kegiatan, dan jaringan komunikasi yang telah terbangun menjadi elemen penting dalam strategi komunikasi GKR Ayu Koes Indriyah. Temuan ini menyoroti

perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai fungsi DPD RI dan pentingnya komunikasi yang efektif untuk mengoptimalkan hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya, sehingga tujuan politis dan sosial dapat tercapai secara lebih efektif dan inklusif (Chumaeson, 2021).

Ketujuh, penelitian ini menggunakan teori efektivitas sebagai kerangka analisis. Mengadopsi pendekatan kuantitatif dan metode survei deskriptif, penelitian ini melibatkan populasi sebesar 1.975.312 orang dari kota dan kabupaten Sukabumi, dengan pengambilan sampel 100 responden melalui penyebaran kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pelaksanaan masa reses tersebut sangat baik dan efektif, dengan rata-rata tanggapan mencapai 78,64%. Temuan ini mengindikasikan bahwa aktivitas reses yang dilakukan oleh Desy Ratnasari berhasil dalam menjangkau dan menyerap aspirasi masyarakat, serta menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara anggota legislatif dan konstituen. Namun, penelitian ini juga membuka ruang untuk pemahaman lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas tersebut, termasuk bagaimana komunikasi dan interaksi yang dibangun selama masa reses dapat berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dan penguatan hubungan antara wakil rakyat dan pemilih di daerah tersebut (Medya Apriliansyah, 2019a).

Kedelapan, penelitian ini mengeksplorasi strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempertahankan konstituen di Jawa Barat melalui penggunaan media sosial Instagram. Instagram dipilih karena menjadi salah satu platform media sosial yang populer di Indonesia, sehingga memberikan akses langsung kepada PKS untuk menjangkau dan berinteraksi dengan masyarakat, terutama konstituen muda. Dengan menggunakan metode studi kasus kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan anggota PKS, tokoh masyarakat, serta analisis terhadap konten yang dipublikasikan di Instagram oleh PKS. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber data primer dan sekunder yang mendalam untuk

memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai efektivitas komunikasi yang dibangun oleh PKS melalui media sosial ini dalam mempertahankan dukungan politik dari konstituen mereka di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Instagram memungkinkan PKS untuk lebih dekat dengan masyarakat, dengan menyampaikan pesan politik secara langsung, memperkuat citra partai, dan meningkatkan keterlibatan konstituen dalam proses politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh DPW PKS Jawa Barat melalui Instagram berjalan dengan cukup terstruktur, melibatkan pengelolaan sumber daya dan alur kerja yang jelas. Konten yang disampaikan di Instagram, yang dikelola oleh divisi humas dan dibagi menjadi beberapa deputi, meliputi gambar dan video yang mencakup isu-isu sosial politik yang berkembang serta publikasi agenda partai. Peneliti menekankan bahwa pembuatan konten di Instagram disesuaikan dengan segmentasi sasaran, yaitu kalangan muda, dan evaluasi pelaksanaan strategi ini dilakukan melalui laporan manual serta acara PR Summit yang diadakan oleh PKS secara nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Instagram, dapat digunakan secara efektif sebagai alat untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan konstituen, serta menyesuaikan pesan politik dengan preferensi dan kebutuhan audiens yang lebih muda di era digital (Maulana & Djuyandi, 2023).

Kesembilan, penelitian ini menganalisis efektivitas hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bulukumba. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini berfokus pada DPRD di Dapil III, mencakup Kecamatan Bulukumpa dan Rilau Ale, dengan melibatkan tiga orang anggota DPRD, dua kepala desa di Bulukumpa, dan tiga kepala desa dari Rilau Ale sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reses anggotanya terbukti efektif dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, di mana anggota DPRD secara aktif berkontribusi dalam proses formulasi kebijakan. Hal ini mencerminkan peran penting anggota DPRD dalam menjembatani aspirasi masyarakat

dengan kebijakan publik, serta menegaskan bahwa reses bukan hanya sebagai kegiatan formal, tetapi sebagai sarana strategis untuk mengumpulkan masukan dari konstituen yang dapat berdampak pada pembangunan daerah. Temuan ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulukumba (Muda et al., 2024) .

Kesepuluh, penelitian ini membahas komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam menyusun kebijakan anggaran untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB di DPRD Kabupaten Majalengka. Dalam konteks ini, komunikasi politik diartikan sebagai proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh elite politik kepada masyarakat secara timbal balik, dengan tujuan untuk mendapatkan respons yang diharapkan dalam pengambilan keputusan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik anggota legislatif perempuan memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh aspek budaya dan sistem kebijakan partai, yang berperan penting dalam menentukan perjalanan dan efektivitas mereka. Metodologi penelitian ini mencakup analisis terhadap berbagai elemen komunikasi, termasuk komunikator, isi pesan, media yang digunakan, dan sasaran komunikasi, serta strategi yang dikembangkan dalam proses penyusunan anggaran. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang diperhatikan oleh anggota legislatif perempuan sangat variatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dengan harapan untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberdayakan perempuan serta anak-anak di daerah tersebut. Penelitian ini penting untuk memahami peran strategis anggota legislatif perempuan dalam kebijakan publik serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip komunikasi politik yang efektif (Fsm, 2018b).

Kepenulisan yang relevan ialah penulisan yang memilki keterbaruan. Penulis telah mengamati dan menemukan letak pembeda ditinjau dari penelitian terdahulu. Keterbaruan pemulisan ini terdiri atas pelaksanaan komunikasi politik, aktor komunikasi politik, sasaran dari komunikasi politik dan tempat penelitian. Pelaksanaan komunikasi politik dalam penulisan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 November tahun 2023 juga pada pelaksanaan reses. Aktor komunikasi politik penulis memilih salah satu anggota legislative yaitu Bapak Eko Herdiyanto. Sasaran komunikasi politik melalui pelaksnaan reses maka disasarkan pada Daerah Pilihan (DAPIL) 2 Kota Malang di Kecamatan Blimbing sebagai konstituennya. Tempat penelitian peneliti di kantor DPRD Kota Malang, oleh karena komunikasi politik pada pelaksanaan reses telah dilakukan maka peneliti ditempat dimana terdapat arsip berkas pelaksanaan yang telah dilaksanakan.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Danisa Luthfi Azura, Indah Adi Putri, Andri Rusta/ Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik, Fungsi Artikulasi Dan Agregasi Kepentingan Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Barat Tahun 2019-2022/2023	bahwa komunikasi yang terbentuk di DPD Partai Gerindra Sumatera Barat memiliki ciri khas tersendiri pesan ketua umum Prabowo subianto dilakukan tanpa melalui mekanisme rapat. Terdapat fungsi artikulasi dan	Dengan menggunakan metode penelitianyang digunakan melalui pendekatan kualitatif studi kasus didukung menyebar kuisioner. Teori yang digunakan teori fungsi partai oleh Gabriel almond. Penelitian tersebut menghasilkan fungsi komunikasi politik dimana masyarakat mengidolakan sosok Prabowo subianto. Dengan	Kebaruan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui efektifitas Komunikasi Politik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota MalangPada Pelaksanaan Reses tahun 2023. Juga melalui metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan permasalahan,

		agregasi pesan yang disematkan melalui acara adat dalam kegiatan reses guna untuk menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPD Partai Gerindra terlaksana dengan baik	lainnya terdapat pelaksaan artikulasi dan agregasi untuk melihat pelaksanaan reses anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat.	hasil, dan pembahasan. Seta dari lokasi peneliti yaitu DPRD Kota Malang, informan peneliti yang terkait dengan reses tahun 2023.
2.	Cut Alma Nuraflah, Delfi Iman Madani Siregar/ Peranan Komunikasi Politik Dalam Peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi E/ Universitas Dharmawangsa/ 2021	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa tidak puas dari masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD komisi E sebelumnya, adapun pencapaian kinerja dari anggota DPRD komisi E yang sekarang dibandingkan periode sebelumnya jauh lebih baik.	penelitian ini menjelaskan permasalahan bagaimana peranan komunikasi politik dalam peningkatan kinerja anggota DPRD komisi E dapil I di kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive yaitu, teknik pengambilan data di mana informan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.	Kebaruan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui efektifitas Komunikasi Politik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota MalangPada Pelaksanaan Reses tahun 2023. Serta dari lokasi peneliti yaitu DPRD Kota Malang, informan peneliti yang terkait dengan reses tahun 2023.

3.	Andi Kardian Riva'i, Hefri Yodiansyah/ Komunikasi Politik Dalam Fungsi Budgeting Dprd Kabupaten Indragiri Hulu/STISIP/ 2020	Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan anggaran, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu melalui Badan Anggaran bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang didasarkan pada buku pedoman anggaran.	Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik dan fungsi budgeting DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini bertempat di DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Peneliti, dalam melakukan penelitian kualitatif mempelajari secara intens situasi yang terjadi pada objek penelitiannya.	Kebaruan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui efektifitas Komunikasi Politik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota MalangPada Pelaksanaan Reses tahun 2023. Serta dari lokasi peneliti yaitu DPRD Kota Malang, informan peneliti yang terkait dengan reses tahun 2023.
4.	Ismunasari, Bahtiar, Jamal Bake/ Efektifitas Pelaksanaan Reses Anggota Legislatif Dalam Penanganan Permasalahan Publik (Studi Kasus Komisi I Dprd Kota Kendari Provinsi	Pada penelitian ini menghasilkan efektivitas pelaksanaan reses Anggota legislatif dalam penanganan permasalahan publik (Studi Kasus Komisi I DPRD Kota Kendari	Dalam penelitian tersbut memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan Reses Anggota Legislatif dalam Penanganan permasalahan Publik (studi Kasus Komisi 1 DPRD Kota Kendari Provinsi	Kebaruan penelitian pada tujuannya yaitu Untuk mengetahui efektifitas Komunikasi Politik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Pada Pelaksanaan

	Sulawesi Tenggara)/ Universitas Halu Oleo Kendari/2022	Provinsi Sulawesi Tenggara) yang dimana masih belum berjalan optimal.	Sulawesi Tenggara). Juga dalam penelitian ini untuk memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi	Reses tahun 2023. Dalam penelitian peneliti memperoleh data dengan wawancara dan dokumentasi sebab peneliti dalam meneliti di masa lampau. Seta dari lokasi peneliti yaitu DPRD Kota Malang, informan peneliti yang terkait dengan reses tahun 2023.
5.	Holilah, Muchammad Ismail/ Model Komunikasi Reses Anggota DPRD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Bangkalan (Studi berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD)/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya/2023	Pada hasil penelitian tersebut menunjukkan model komunikasi reses yang digunakan oleh anggota DPRD yang berpendidikan sarjana dan tidak sarjana tidak ada perbedaan yang mencolok atau signifikan. Model komunikasi yang dilakukan secara dua arah akan tetapi memiliki	Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat apakah ada perbedaan model komunikasi yang digunakan anggota dewan yang berpendidikan sarjana dengan bukan sarjana di Kabupaten Bangkalan serta apakah ada kendala komunikasi yang melingkupi. Serta penelitian ini menggunakan studi lapang dengan jenis studi kasus	Untuk mengetahui efektifitas Komunikasi Politik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota MalangPada Pelaksanaan Reses tahun 2023. Juga melalui metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan permasalahan, hasil, dan pembahasan. Dalam penelitian peneliti memperoleh data dengan wawancara dan

		kendala yang menyampaikan mayoritas laki-laki dan perempuan sedikit		dokumentasi sebab peneliti dalam meneliti di masa lampau. Seta dari lokasi peneliti yaitu DPRD Kota Malang, informan peneliti yang terkait dengan reses tahun 2023.
6.	Wahyuning Chumaeson/ Strategi Komunikasi Politik Gkr Ayu Koes Indriyah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Dpd Ri) Dapil Jawa Tengah Periode 2014 - 2019 Terhadap Konstituennya Di Provinsi Jawa Tengah/ Universitas Boyolali/2021	Dari hasil penelitian tersebut termuat beberapa strategi komunnikasi GKR Ayu Koes Indriyah kepada konstituen, pertama komunikasi langsung kepada konstituen. Kedua, pesan yang disampaikan taat menjalankan perintah agama, menanamkan nilai Pancasila, pentingnya Pendidikan budi pakerti. Ketiga menyampaikan tugas dan wewenang	Pada penelitian tersebut bagian kerangka teoritik menjelaskan beberapa variable yaitu pemahaman strategi, komunikasi politik, strategi komunikasi politik, pemahaman konstiruen . Juga dalam penelitian ini meneliti Strategi komunikasi GKR Ayu Koes Indriyah kepada konstituen,	Untuk mengetahui efektifitas Komunikasi Politik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota MalangPada Pelaksanaan Reses tahun 2023. Dalam penelitian peneliti memperoleh data dengan wawancara dan dokumentasi sebab peneliti dalam meneliti di masa lampau. Seta dari lokasi peneliti yaitu DPRD Kota Malang, informan peneliti yang terkait dengan reses tahun 2023.

		DPD RI kepada konstituen		
7.	Medya Apriliansyah/ Efektifitas Pelaksanaan Masa Reses Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Di Daerah Pemilihan Jabar Iv/ Akademi Sekretari Budi Luhur/2019	Pada hasil penelitian tersebut yang dimana melalui penyebaran quisioner 100 sampel. Yang dimana responden tersebut menghasilkan rata rata sebesar 78,64%. Yang berarti sudah sangat baik dan efektif pelaksanaan masa reses yang dilakukan oleh Desy Ratnasari sebagai anggota DPR RI	Pada penelitian tersbut menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data, dimana instrument kuisioner diterjemahkan melalui angka. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kuantitatif, yang akan mengukur keefektifan pelaksanaan masa reses anggota DPR RI periode 2014-2019	Untuk mengetahui efektifitas Komunikasi Politik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota MalangPada Pelaksanaan Reses tahun 2023. Juga melalui metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan permasalahan, hasil, dan pembahasan. Seta dari lokasi peneliti yaitu DPRD Kota Malang, informan peneliti yang terkait dengan reses tahun 2023.
8.	Refi Gilang Maulana, Yusa Djuyandi/ Strategi Komunikasi Politik PKS dalam Mempertahankan Konstituen di Jawa Barat Melalui Instagram/ Universitas	Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahwa strategi komunikasi politik yang telah dilakukan oleh DPW PKS Jawa Barat dengan	Pada penelitian ini metode yang digunakan menggunakan kualitatif secara penelitian studi kasus. Kemudian metode kualitatif studi kasus memiliki ciri utama yaitu pemahaman	Untuk mengetahui efektifitas Komunikasi Politik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota MalangPada Pelaksanaan Reses tahun

	Padjadjaran/ 2023	menggunakan media sosial Instagram sudah cukup terstruktur. Focus pada penelitian tersebut pada strategi komunikasi politik oleh PKS Provinsi Jawa Barat melalui penggunaan media sosial Instagram untuk mempertahankan konstituen, dan hanya berfokus pada penggunaan media sosial Instagram, tidak dengan media sosial yang lain	mendalam tentang sebuah kasus.	2023. Juga melalui metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan permasalahan, hasil, dan pembahasan. Seta dari lokasi peneliti yaitu DPRD Kota Malang, informan peneliti yang terkait dengan reses tahun 2023.
9.	Kahar Muda, Muhammad Idri, Salim Sultan/ Analisis Efektivitas Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten	Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Khususnya daerah pemilihan III Kecamatan Bulukumpa dan	Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran anggota DPRD dalam proses perumusan kebijakan di Kabupaten Bulukumba. Penelitian dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil III Kecamatan Bulukumpa dan Rilau Ale.	Untuk mengetahui efektifitas Komunikasi Politik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota MalangPada Pelaksanaan Reses tahun 2023. Juga melalui metode kualitatif deskriptif untuk

	Bulukumba/ ITB Nobel Indonesia Makassar/2024	Kecamatan Rilau Ale sudah efektif dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba. Kedua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Khususnya Daerah Pemilihan III Kecamatan Bulukumpa dan Rilau Ale sudah berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan di Kabupaten Bulukumba		menggambarkan permasalahan, hasil, dan pembahasan. Seta dari lokasi peneliti yaitu DPRD Kota Malang, informan peneliti yang terkait dengan reses tahun 2023.
10.	Nurannafi FSM/ Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Di Kota Majalengka/ universitas DR.Soetomo/2018	Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komunikasi politik anggota legislatif perempuan dalam kebijakan memiliki ciri khas yang	Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara metode studi kasus. Studi kasus yaitu sebuah metode yang pada penelitian berfokus untuk menggali lebih lanjut kasus trsebut. Kasus	Untuk mengetahui efektifitas Komunikasi Politik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota MalangPada Pelaksanaan Reses tahun

		berbeda pada setiap anggota, hal ini dikarenakan faktor budaya dan sistem kebijakan partai yang sangat berpengaruh pada perjalanan para legislatif perempuan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik anggota legislatif perempuan dalam kebijakan penyusunan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB di DPRD Kabupaten Majalengka.	dipilih karena bersifat longitudinal, yaitu terjadi dalam dua atau lebih pada waktu yang berlainan.	2023. Juga melalui metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan permasalahan, hasil, dan pembahasan. Seta dari lokasi peneliti yaitu DPRD Kota Malang, informan peneliti yang terkait dengan reses tahun 2023.

Sumber: Hasil Olah Peneliti Melalui Berbagai Literature

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Komunikasi politik

Definisi komunikasi politik menurut Nimmo dari jurnal (Waluyo, 2019a) merupakan suatu aktivitas yang dikategorikan sebagai komunikasi, khususnya komunikasi politik, berdasarkan konsekuensi nyata maupun potensial yang timbul akibat pengaturan perilaku individu dalam situasi yang mengandung konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik memiliki posisi penting dalam mengatur dinamika sosial, terutama karena banyak teori dan pendekatan dalam ilmu komunikasi yang diterapkan dalam praktik komunikasi politik itu sendiri, maka ilmu komunikasi lebih dahulu lahir dan berkembang daripada komunikasi politik. Dalam hal ini perbedaan yang mencolok pada komunikasi politik adalah berfokus pada proses penyebaran informasi politik (Medita & Hanifah, 2020). Awal mula berdirinya disiplin ilmu komunikasi politik sehubungan dengan komunikasi dan politik. Focus yang diberikan oleh komunikasi politik bergantung pada pesa yang disampaikan, diterima, dan dipengaruhi oleh berbagai aktor serta seluruh elemen yang berada pada system politik (Syabana & Suyono, 2023). Kajian tersebut mecakup bagaimana proses komunikasi yang disampaikan oleh aktor politik seperti, organisasi partai politik, pemerintah, dan media yang menyampaikan pesan kepada pemerintah dan atau media menyampaikan pesan kepada masyarakat. Komunikasi politik juga mengeksplorasi cara pesan-pesan tersebut memengaruhi opini publik, membentuk kebijakan, serta meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat. Selain itu terdapat model dari komunikasi politik itu sendiri yang telah dijelaskan oleh lasswell dari jurnal (Waluyo, 2019b) bahwa komunikasi politik tersebut mengupayakan penekanan persuasi. Oleh karena itu komunikasi politik berada pada posisi lintas antara ilmu komunikasi dan ilmu politik yang memiliki sifat multidisiplin.

Dalam hal ini komunikasi politik menurut Nimmo bukan hanya sekedar meneruskan informasi dari sumber kepada masyarakat atau publik, akan tetapi lebih mudahnya memahami untuk menciptakan kenbali suatu gagasan informasi kepada masyarakat atau publik, bila disuguhkan simbol, slogan, atau tema pokok yang kuat, biasanya akan lebih mudah diarahkan untuk memahami, mendukung, atau menolak suatu gagasan politik dari suatu kegiatan (Fsm, 2018a). Sebagai upaya untuk memahami dari komunikasi politik itu sendiri perlu adanya unsur-unsur yang melekat, dengan menggunakan teori menurut Nimmo berada di jurnal (Desman Jaya Gulo, 2021b) mampu untuk memahami komunikasi politik secara mendalam yaitu menjabarkan lima unsur komunikasi politik sebagai berikut:

1. Komunikator Politik

   Komunikator politik adalah individu atau kelompok yang memainkan peran strategis dalam proses penyampaian pesan politik kepada masyarakat luas. Mereka tidak hanya terbatas pada politisi atau pejabat publik, tetapi juga bisa meliputi akademisi, pemimpin organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, hingga influencer yang memiliki pengaruh terhadap opini publik. Komunikator politik bertugas menginterpretasikan isu-isu politik, membentuk narasi, dan membangun citra politik tertentu agar pesan yang disampaikan dapat diterima, dipahami, dan memengaruhi sikap atau perilaku publik. Peran mereka sangat penting dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta menjaga transparansi dan partisipasi dalam proses demokrasi.

2. Pesan politik

   Pesan politik merupakan inti dari proses komunikasi politik yang bertujuan menyampaikan informasi, ide, maupun ajakan terkait isu-isu kenegaraan, pemerintahan, dan kepentingan publik. Isi pesan ini dapat berupa dukungan terhadap suatu kebijakan, kritik terhadap tindakan politik tertentu, promosi program kerja, atau penyebaran

ideologi partai politik. Pesan politik dirancang secara strategis agar dapat membentuk opini publik, menggerakkan partisipasi masyarakat, serta membangun citra politik aktor atau lembaga yang menyampaikannya. Efektivitas pesan politik sangat bergantung pada kejelasan isi, kredibilitas komunikator, serta ketepatan dalam memilih saluran komunikasi yang digunakan.

3. Saluran atau media politik

   Saluran atau media politik merujuk pada alat atau platform yang digunakan untuk menyampaikan pesan politik kepada khalayak. Media ini berperan sebagai penghubung antara politisi, partai politik, atau lembaga pemerintah dengan masyarakat. Berbagai jenis media digunakan dalam menyebarkan informasi, seperti media massa (televisi, radio, surat kabar), media sosial, serta pertemuan tatap muka seperti diskusi publik, debat, atau kampanye. Media massa memainkan peran penting dalam menjangkau audiens yang lebih luas, sementara media sosial memungkinkan interaksi langsung dan lebih cepat antara politisi dengan konstituen mereka. Diskusi publik dan kampanye langsung memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya, memberikan masukan, dan terlibat langsung dalam proses politik. Saluran-saluran ini sangat penting dalam menciptakan transparansi, mendidik publik, dan membentuk opini politik masyarakat. Adanya saluran-saluran ini memungkinkan masyarakat untuk tetap terinformasi, sekaligus memberi mereka platform untuk terlibat dalam proses politik, baik secara aktif maupun pasif.

4. Sasaran atau target politik

   Sasaran politik berperan sebagai audiens utama dalam proses komunikasi politik, yaitu kelompok atau individu yang menjadi tujuan penyampaian pesan politik. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, seperti pemilih, kelompok kepentingan, komunitas lokal, hingga generasi muda yang aktif di media sosial. Meskipun tidak selalu tergabung dalam institusi formal, sasaran politik memiliki kekuatan dalam membentuk persepsi

publik dan memengaruhi arah kebijakan melalui respons mereka, seperti partisipasi dalam pemilu, aksi protes, atau dukungan terhadap isu tertentu. Oleh karena itu, strategi komunikasi politik harus mempertimbangkan karakteristik dan preferensi sasaran politik agar pesan yang disampaikan tepat guna dan berdampak.

5. Efek Komunikasi Politik

   Efek komunikasi politik adalah dampak atau perubahan yang dirasakan oleh audiens setelah menerima pesan politik. Perubahan ini bisa berupa perubahan dalam hal pengetahuan, sikap, maupun perilaku politik, yang secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu efek kognitif, afektif, dan konatif. Efek kognitif berkaitan dengan bertambahnya pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai isu-isu politik, kebijakan publik, atau figur politik tertentu. Sementara itu, efek afektif mencerminkan perubahan sikap emosional audiens terhadap objek politik, seperti munculnya rasa simpatik atau antipati terhadap partai politik atau tokoh tertentu. Adapun efek konatif menyangkut perubahan perilaku politik yang nyata, seperti partisipasi dalam pemilu, keterlibatan dalam diskusi politik, atau bahkan aksi politik di lapangan. Selain itu, efek komunikasi politik juga dapat dibedakan menjadi efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Efek jangka pendek cenderung bersifat sementara dan terjadi segera setelah pesan diterima, seperti perubahan opini atau minat sesaat terhadap suatu isu, sedangkan efek jangka panjang cenderung lebih mendalam dan bertahan lama, seperti pembentukan identitas politik, penguatan loyalitas terhadap partai, serta konsistensi dalam perilaku memilih. Tingkat keberhasilan atau kegagalan efek komunikasi politik ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kredibilitas komunikator, media yang digunakan, intensitas penyampaian pesan, serta latar belakang sosial dan psikologis dari audiens itu sendiri. Efek tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti efek kognitif

(pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (perilaku). Pada unsur ini juga terdapat pengelompokan yaitu :

a) Kognitif (gagasan atau pemikiran)

   Pada kognitif ini berhubungan tentang pengetahuan sesuatu yang dimana melalui pesan pesan komunikasi bermuatan informasi dan kenyataan yang berisi gagasan atau pemikiran seseorang

b) Afektif (emosi)

   Pada afektif ini berhubungan dengan sikap yang dimana melalui pesan komunikasi dapat mengubah perasaan atau emosi terhadap sesuatu

c) Konatif (motivasi)

   Pada konatif ini berhubungan dengan sikap yang dimana melalui pesan komunikasi yang mengarahkan seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu.

Menurut Lasswell dalam jurnal (Meifilina, 2021) komunikasi politik memiliki dua orientasi utama. Pertama, komunikasi politik selalu berfokus pada nilai-nilai atau tujuan tertentu yang terbentuk dalam proses perilaku sosial dan politik. Nilai dan tujuan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan muncul sebagai bagian integral dari dinamika interaksi politik yang lebih luas. Kedua, komunikasi politik bersifat proaktif dengan tujuan untuk mengantisipasi masa depan, sambil tetap terhubung dengan masa lalu. Hal ini berarti komunikasi politik tidak hanya berupaya memahami kejadian yang telah berlalu, tetapi juga merancang langkah strategis untuk menghadapi perkembangan politik di masa mendatang (Purike, 2022). Pendekatan ini mencerminkan bagaimana komunikasi politik tidak hanya bersifat informatif tetapi juga strategis dalam membentuk opini publik, kebijakan, dan hubungan antara aktor politik dengan masyarakat.

Komunikasi politik memiliki peran penting dalam memobilisasi dukungan politik dan membangun kepercayaan terhadap aktor politik maupun pemerintah. Pemimpin politik menggunakan strategi penciptaan pesan yang cermat, seperti branding politik, untuk memanfaatkan kekuatan simbol dan tanda yang dapat memengaruhi opini publik. Menurut McNair dalam jurnal Hayat, (2021) komunikasi politik konvensional ditandai oleh tiga aspek utama: penyampaian pesan oleh aktor politik untuk mencapai tujuan tertentu, komunikasi dari aktor nonpolitik kepada aktor politik, serta penyampaian pesan politik melalui media massa sebagai sarana utama.

Dalam konteks demokrasi modern, komunikasi politik tidak hanya menjadi alat penghubung antara pemimpin dan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Media sosial sebagai salah satu instrumen komunikasi politik kontemporer telah mengubah pola interaksi antara politisi dan masyarakat. Melalui platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, aktor politik dapat menjangkau khalayak lebih luas, menyampaikan pesan secara langsung, dan membentuk citra politik secara real time. Hal ini menciptakan dinamika komunikasi dua arah yang memungkinkan publik memberikan respons dan membentuk opini kolektif secara lebih cepat dan terbuka.

Namun demikian, komunikasi politik yang efektif membutuhkan perencanaan strategis dan kepekaan terhadap nilai-nilai budaya serta aspirasi masyarakat. Ketidaksesuaian antara pesan politik yang disampaikan dan ekspektasi publik dapat menimbulkan kesenjangan komunikasi yang berdampak negatif pada legitimasi politik. Oleh karena itu,

penting bagi aktor politik untuk tidak hanya menyampaikan pesan yang menarik, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, komunikasi politik dapat menjadi alat yang tidak hanya memengaruhi persepsi, tetapi juga memperkuat stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Dapat dilihat pada konteks politik, pemegang hak atau yang memiliki hak suara sering kali diarahkan oleh kandidat melalui Gerakan strategis komunikasi yang efektif guna untuk memberikan persetujuan kepada kandidat tesebut. Hal ini memiliki tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat utamanya memberikan dukungan saat pemilu (Tentang et al., 2023). Sebagaimana Salah satu cara ideal untuk meraih persetujuan tersebut adalah dengan menyediakan informasi yang relevan, transparan, dan menarik, serta mengusulkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, pemilih dapat merasa terlibat dalam proses politik dan memahami dampak positif yang diharapkan dari keputusan mereka, sehingga meningkatkan kepercayaan serta partisipasi aktif dalam sistem demokrasi (Alvin, 2022).

Indonesia menganut system pemerintahan yaitu demokrasi. Perlu diketahui bahwa demokrasi merupakan system yang dimana masyarakat berperan aktif dalam memerintah pemerintahan indoensia dengan keterwakilan daripada masyarakat tersebut. Tercapainya keterwakilan sebagai pemimpin maka perlu adanya Pemilihan Umum (PEMILU) (Hidayati, 2021). Setiap lima tahun sekali atau setiap masa periode jabatan pemilu akan diselenggarakan sekaligus sebagai salah satu indikator bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Dewasa ini indonesia telah

melakukan Pemilihan Umum (PEMILU) dengan berbagai dinamika politik dan sosial yang berbeda beda, sehingga khususnya setiap diadakannya pemilu berharap dapat menjadi arena konsolidasi demokrasi dan meningkatkan pasrtisipasi politik pada masyarakat. Akan tetapi keberhasilan setiap Pemilihan Umum (PEMILU) tidak hanya bertumpuan pada teknis Pemilihan Umum (PEMILU), tetapi juga menjadi tolok ukur masyarakat memahami substansi pentingnya berpartisipasi dalam salah satu proses politik yang demokrastis. Jika dikaitkan dengan komunikasi politik maka saat itu sangat berperan signifikan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU). Singkatnya komunikasi politik melekat pada actor dari pemimpin atau calon pemimpin dengan cara Pemilihan Umum (PEMILU), sehingga pemimpin atau calon pemimpin mampu membawa pesan politik dan dapat menjawab semua keresahan dari masyarakat pada kehidupan bernegara dan juga komunikasi politik menjadi sarana untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi pada proses Pemilihan Umum (PEMILU) (Nurhayati, 2023).

2.2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada dasarnya anggota Dewan Perwakilan Daeah (DPRD) dipilih oleh rakyat, maka memiliki tugas sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang nantinya akan dimasukkan ke dalam system pemerintah daerah. Dengan mudagnya mengatakan Dewan Perwakilan Daeah (DPRD) juga sebagai jembatan bagi semua masyarakat untuk membawa permasalahan dan aspirasi masyarakat kedalam system, sehingga Dewan Perwakilan Daeah (DPRD) dapat menindaklanjuti melalui fungsi dan peran penting yang diemban Dewan Perwakilan Daeah (DPRD) sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. (Ardianto et al., 2022), sebagai berikut:

1. Fungsi pembentukan perda

   Pada pasal 3 yaitu fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara yaitu Menyusun program pembentukan perda, Bersama kepala daerah, membahas Bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda, dan mengajukan usul rancangan perda
2. Fungsi Anggaran

   Pada pasal 15 fungsi anggaran DPRD Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah. Oleh karena itu fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara yaitu 1) membahas kebljakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah, 2) membahas rancangan perda, 3) membahas rancangan perda tentang perubahan APBD, 4) membahas rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
3. Fungsi pengawasan

   Pada pasal 21 fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap, 1) pelaksanaan perda dan peraturan kepala daerah, 2) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

   Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung amanat penting bahwa setiap daerah yang memiliki hak otonomi wajib membentuk

badan perwakilan rakyat daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah otonom menjadi tempat berjalannya prinsip-prinsip dasar permusyawaratan. Kehadiran badan perwakilan di daerah menjadi simbol sekaligus sarana utama dalam menjalankan demokrasi lokal. Dengan demikian, keberadaan DPRD tidak hanya sekadar pelengkap pemerintahan daerah, tetapi merupakan unsur penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang partisipatif dan transparan (Bawon Nul Hakim, 2019). Dengan berpegang teguh pada prinsip normative, dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki posisi yang sangat penting dan sentral dalam kedaulatan rakyat. Pada dasarnya di dalam demokrasi posisi Dewan Perwakilan Rakyat sangat berpengaruh dalam keterwakilan seluruh masyarakat pada suatu daerah. Semua yang menjadi keresahan dan permasalahan dihadapi masyarakat mampu terjawab dan untuk menjadi solusi dengan kemampuan kompetensi yang dimiliki setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkhusus pada proses politik (Juru & Gorda, 2021).

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu fungsi utama yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fungsi ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta lebih lanjut diperjelas melalui Pasal 42 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan ini memiliki tujuan untuk memastikan agar proses perencanaan dan penggunaan anggaran di daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana, efisien, dan efektif. Dengan adanya pengawasan ini, DPRD berperan sebagai kontrol untuk memeriksa apakah

pelaksanaan anggaran benar-benar mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, serta sasaran yang ingin dicapai, sejak tahap perencanaan hingga eksekusi.

Pengawasan yang dilakukan DPRD tidak hanya sebatas memeriksa penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah disetujui dalam APBD dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan ini sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah serta kebutuhan masyarakat.

Menurut (Azahra & Lubis, 2021), pengawasan DPRD atas APBD terbagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, DPRD sudah mulai terlibat aktif dengan menyusun arah dan kebijakan umum APBD bersama pemerintah daerah. Kegiatan ini diawali dengan menghimpun aspirasi masyarakat dan mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti rencana strategis daerah serta kebijakan nasional terkait keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Dari proses ini, kepala daerah merumuskan prioritas dan strategi penyusunan APBD (Nurdin, 2020). Selanjutnya, tahap pelaksanaan melibatkan beberapa upaya pengawasan aktif dari DPRD, seperti:

1. Pembentukan alat kelengkapan DPRD seperti pimpinan DPRD, badan anggaran, badan musyawarah, komisi-komisi, serta badan legislasi, yang masing-masing memiliki peran dalam mengawasi jalannya APBD.
2. Reses dan penyerapan aspirasi masyarakat, sebagai langkah untuk menangkap kebutuhan dan suara

rakyat secara langsung agar pelaksanaan anggaran tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

3. Pengawasan terhadap eksekutif, yaitu mengawal agar pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah dilakukan secara efisien dan akuntabel. DPRD juga melakukan dialog atau hearing dengan pihak eksekutif dalam pembahasan anggaran, serta melakukan evaluasi terhadap kinerjanya guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Ramadhani, 2024).

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara optimal, DPRD memiliki peran strategis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat prinsip good governance di tingkat lokal. Melalui pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan APBD, DPRD dapat memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, pembahasan, dan evaluasi anggaran juga menjadi cerminan dari tanggung jawab moral dan politik DPRD sebagai wakil rakyat.

Ke depan, penguatan kapasitas anggota DPRD dalam memahami aspek teknis dan substansi anggaran perlu terus ditingkatkan, agar fungsi pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu menjawab kebutuhan daerah secara nyata. Dukungan sistem informasi yang transparan, keterbukaan data publik, serta partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam memperkuat peran DPRD

sebagai penjaga kepentingan publik. Dengan demikian, DPRD tidak hanya menjadi lembaga legislatif yang menjalankan fungsi normatif, tetapi juga motor penggerak perubahan menuju tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, adil, dan berpihak pada rakyat.

2.2.3 Reses

Reses merupakan masa dimana setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang beraktifitas diluar masa sidang (Utha et al., 2023). Kegiatan reses wajib dilaksanakan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai dari pusat sampai dengan daerah. Bentuk masa reses yang dilaksanakan beraneka ragam mulai dari seperti audience dan yang paling umum dijumpai adalah kunjungan kerja oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke konstituen sesuai dengan Daerah Pilihan (DAPIL) awal Pemilihan Umum (PEMILU) (Medya Apriliansyah, 2019b). Tujuan daripada reses itu sendiri adalah penyampaian aspirasi, ide, gagasan, permasalahan, keluh kesah masyarakat akan yang dialami seputar dengan pemerintah daerah. Namun tidak hanya sebatas terkait dengan hal itu msaih banyak tujuan reses seperti mendengarkan laporan kinerja dari wakil Daerah Pilihan (DAPIL) dan dapat menjadi pengawas kinerja dari wakil Daerah Piihan (DAPIL) tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah DPRD Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 mengenai tata tertib anggota dewan, khususnya dalam Pasal 89 ayat (3), disebutkan bahwa pembagian masa kerja DPRD terdiri atas dua bagian, yakni masa sidang dan masa reses. Namun, terdapat pengecualian dalam masa sidang terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, di mana pada masa tersebut kegiatan reses tidak diselenggarakan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh fokus dan energi difokuskan pada penyelesaian agenda legislasi sebelum masa jabatan berakhir. Selanjutnya, dalam Pasal 90 ayat (1), ditegaskan bahwa masa pelaksanaan kegiatan reses dibatasi paling lama enam hari dalam satu periode reses. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas waktu serta menjaga kesinambungan kinerja DPRD dengan jadwal yang terstruktur.

Dalam ayat (2) pasal yang sama, dijelaskan bahwa Sekretaris DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh anggota dewan terkait jadwal pelaksanaan reses. Pemberitahuan ini wajib disampaikan paling lambat tiga hari sebelum kegiatan dimulai dan harus dilakukan melalui media atau saluran informasi yang mudah dijangkau dan diakses oleh para anggota. Sedangkan pada ayat (4), disebutkan bahwa setelah melaksanakan kegiatan reses, setiap anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis kepada pimpinan DPRD. Laporan tersebut setidaknya harus memuat informasi mengenai waktu dan lokasi kegiatan reses, tanggapan serta masukan dari masyarakat, termasuk juga dokumentasi dalam bentuk foto atau media lain yang mendukung keabsahan kegiatan.

Kegiatan reses sendiri merupakan momen penting bagi anggota dewan untuk kembali ke daerah pemilihannya, mendengarkan secara langsung suara dan kebutuhan masyarakat, serta menjembatani kepentingan publik ke dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintahan. Oleh karena itu, keteraturan administrasi dan pelaporan hasil reses menjadi bagian vital dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga legislatif. Proses reses diawali dengan penyusunan jadwal oleh masing-masing fraksi atau komisi. Anggota legislatif kemudian mengunjungi daerah pemilihannya untuk mengadakan pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, seperti tokoh agama, organisasi masyarakat, dan warga umum. Dalam pertemuan ini, anggota legislatif mencatat aspirasi yang disampaikan untuk diolah dan diperjuangkan pada masa sidang berikutnya (Gigih Budoyo, 2022).

Setelah kegiatan di lapangan selesai, laporan hasil reses harus disusun dan disampaikan kepada pimpinan legislatif sebagai dokumen resmi. Paparan meruapakan sebuah bentuk akuntabilitas setiap anggota legislative secara administrative. Bentuk laporan reses nantinya akan dikumpulkan dan menjadi arsip di tempat diamana anggota dewan bekerja dan nantinya akan menjadi Pokok Pikiran. Pokok pikiran menurut penulis merupakah Langkah setelah serap aspirasi masyarakat terhadap konstituen

dan akan diperjuangkan dalam forum politik untuk menjadi landasan pembangunan suatu daerah (Fajri Ramadhani, 2024). Reses memiliki manfaat penting, seperti meningkatkan hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat serta memastikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, proses ini juga menghadapi tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat atau terbatasnya waktu untuk menjangkau seluruh kelompok di daerah pemilihan. Oleh karena itu, anggota legislatif dituntut untuk menjalankan reses dengan strategi yang efektif, transparan, dan akuntabel agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat (Erpandi Kusuma Admaja, 2023).

Sebagai bagian integral dari mekanisme demokrasi lokal, kegiatan reses seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas formalitas tahunan, tetapi benar-benar dijadikan sebagai jembatan komunikasi dua arah antara legislatif dan masyarakat. Kualitas pelaksanaan reses sangat menentukan efektivitas penyusunan kebijakan publik yang berbasis kebutuhan riil warga. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap pola pelaksanaan reses, mulai dari metode pengumpulan aspirasi, pendekatan komunikasi, hingga bentuk pelaporan hasilnya. Evaluasi ini bertujuan agar aspirasi masyarakat tidak berhenti hanya sebagai catatan administratif, tetapi benar-benar diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Di masa mendatang, penguatan kapasitas anggota legislatif dalam hal komunikasi politik, dokumentasi, serta penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas reses. Selain itu, keterlibatan masyarakat harus terus didorong melalui edukasi politik yang berkesinambungan agar mereka memahami pentingnya menyuarakan kebutuhan dan pendapatnya. Hanya dengan kolaborasi yang kuat antara legislatif dan konstituen, proses pembangunan daerah dapat diarahkan secara partisipatif, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

.